

## DPRD Dorong Sejumlah Klub Gabung ke Liga Primer

JAKARTA — Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di beberapa propinsi mendorong klub-klub di wilayah terkait untuk bergabung ke Liga Primer Indonesia (LPI). Alasannya, bermain di LPI tidak akan membuat klub bergantung pada APBD.

Anggota DPRD Kota Kediri, Ardian Sayoga, misal-

nya, meminta Pemerintah Kota menghentikan kucuran dana APBD bagi Persik Kediri. Dia menyarankan Persik bergabung ke Liga Primer. Dalam APBD 2010, Persik menerima sokongan dana Rp 8 miliar.

Kalangan anggota DPRD Kota Semarang juga menyarankan kesebelasan PSIS Se-

marang beralih ke Liga Primer. "Kalau di LPI memang lebih mandiri, musim mendatang kenapa tidak?" kata Supriyadi, Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, kemarin. Tahun ini PSIS menerima dana APBD Rp 5 miliar.

Desakan serupa datang dari DPRD Lamongan, yang meminta Persela Lamongan

berlaga di Liga Primer. "Saya setuju ke LPI saja," kata Ketua Komisi C DPRD Lamongan, Saim. Alasannya, prospek Liga Primer lebih cerah. Pada 2010, Persela menerima dana APBD Rp 14 miliar.

Ketua Komisi B DPRD Medan, Irwanto Tampubolon, juga meminta Pemerintah Kota Medan menyetop dana

APBD untuk PSMS Medan. Setelah mendapat izin pemerintah, menurut Irwanto, Liga Primer bisa menjadi alternatif bagi kemandirian klub-klub sepak bola Indonesia.

Kesulitan keuangan juga dialami klub-klub besar lain. Pemain Persija Jakarta sudah tiga bulan tak menerima gaji rutin. "Kami akan mengusa-

hakan secepatnya," kata Asisten Manajer Persija, Ferry Indra Syarif, Senin lalu.

Hal serupa dialami para pemain Arema Malang, yang belum menerima gaji tiga bulan terakhir. "Terlalu banyak janji sejak tahun lalu," kata bek Arema, Pierre Njanka, kemarin siang. ● FIRMAN H | HARI T W | ABDI P | SOHIRIN | SUJATMIKO | SOETANA M H | RINA W

## BPK Didesak Audit PSSI

"BPK berwenang melakukan pemeriksaan."

JAKARTA — Koalisi reformasi sepak bola nasional, Save Our Soccer, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penggunaan keuangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). "Kami minta lima tahun terakhir. Tapi kalau tidak, ya, minimal tahun 2010 saja," ujar anggota Save Our Soccer, Apung Widadi, kepada *Tempo* kemarin.

Aktivist Indonesia Corruption Watch ini mengatakan dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk induk olahraga sepak bola cukup besar. "Pada 2010 sekitar Rp 20 miliar, dan tahun ini dalam RAPBN disebutkan Rp 80 miliar," ujarnya. Permintaan audit ini, menurut Apung, dilandasi kepedulian akan mandeknya prestasi persepbola nasional. Meskipun pemerintah sudah menggelontorkan dana besar, sepak bola nasional tidak kunjung menunjukkan tajinya. "Kami khawatir anggaran ini disalahgunakan." ICW juga sedang melakukan investigasi dugaan penyimpangan penggunaan anggaran PSSI. "Kami sedang investigasi dan mendalami untuk apa saja anggaran ini digunakan," ujarnya.

Anggota BPK, Hasan Bisri, menyatakan akan memeriksa keuangan PSSI yang sumbernya berasal dari pemerintah. "Diminta atau tidak, BPK berwenang melakukan pemeriksaan," kata Hasan. "Itu akan terlihat di laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga," ujar Hasan. Meski begitu, kata dia, BPK tidak bisa secara reaktif menanggapi desakan tersebut.

Alasannya, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah badan dapat diperiksa laporan keuangannya.

Jika ICW menangkap indikasi adanya penyimpangan penggunaan anggaran, dia menambahkan, sebaiknya hal itu disampaikan kepada BPK secara tertulis, tidak hanya melalui media. "Kami akan memeriksa pada saat pemeriksaan laporan keuangan Kementerian atau lembaga, sekitar April atau Mei tahun ini," katanya. Sebab, ada ketentuan bahwa laporan keuangan harus sudah disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya pada bulan ketiga.

Adapun Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan siap diaudit BPK. "Kami siap memberi laporan, masih ada waktu sekitar dua atau tiga bulan," kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam. Saat ini, Wafid menambatkan, Kementerian Olahraga juga masih menunggu laporan keuangan PSSI. "Mungkin masih belum selesai disusun PSSI," ujarnya.

Dia menjelaskan, audit dilakukan oleh auditor internal, yaitu Inspektorat, dan auditor eksternal, yakni BPK. "BPK melakukan audit keuangan Kemenpora, yang di dalamnya termasuk PSSI," katanya.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Rita Subowo menegaskan, pihaknya sudah lama tidak memberikan dana APBN untuk kegiatan operasional induk-induk cabang olahraga atau pengurus besar olahraga. "Semua dana diberikan langsung oleh Kemenpora kepada pengurus besar, dan besarnya kami juga tidak tahu," kata Rita.

● FEBRIYAN | EVANA DEWI | BASUKI RAHMAT | EZTHER LASTANIA | ALI ANWAR

**BANK BRI**  
Melayani Dengan Setulus Hati

Bank negeri sendiri yang mampu melayani semua sama baiknya

Bangga sebagai bank negeri sendiri, BANK BRI menegaskan posisinya sebagai bank dengan kinerja memuaskan ditengah meningkatnya persaingan. Pelayanan prima ke semua lapisan masyarakat didukung oleh teknologi informasi yang handal, sumber daya manusia profesional, serta jaringan terluas hingga ke pelosok negeri yang seluruhnya terhubung secara *real-time on-line*. BANK BRI tidak pernah berhenti mewujudkan impian nasabah untuk memiliki sendiri apa yang diinginkan.

Call BRI 14017  
www.bri.co.id